

"Tantangan adalah berkah yang memaksa kita untuk mencari pusat gravitasi yang baru. Jangan melawannya. Carilah cara yang berbeda dalam bersikap."

Oprah Winfrey,
Philanthropist

EDISI RABU / 18 Desember 2019

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

KPK ENDUS RP 10 M DIKANTONGI POLITIKUS



Duit senilai Rp 10 miliar terkait kasus korupsi di Kementerian Agama (Kemenag) diduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalir ke kantong-kantong politikus. Astaga!

(Baca, Hal 11)

JEJAK KINERJA KPK

2016
17OTT
58 TERSANGKA

2017
19OTT
72 TERSANGKA

2018
30OTT
121 TERSANGKA

2019
21OTT
76 TERSANGKA

TERMINAL INTERMODA JOYOBOYO TERAPKAN PEMBAYARAN ELEKTRONIK



Surabaya-Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ) yang rencananya akan diresmikan akhir Desember 2019 bakal menggunakan system canggih. Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya akan menerapkan pembayaran elektronik atau e-payment.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menyampaikan tujuan menggunakan

pembayaran elektronik ini untuk mempermudah transaksi. "Jadi tidak perlu diributkan oleh uang palsu dan kembalian saat keluar masuk kendaraan," kata Irvan, Selasa (17/12).

Untuk mendukung program pembayaran elektronik, Irvan mengatakan, Dishub bekerjasama dengan beberapa bank. Nantinya diharapkan dapat langsung direalisasikan saat pembukaan. Irvan menjelaskan, TIJ ini juga menyediakan parkir untuk kendaraan roda dua, roda empat hingga bus pariwisata.

"TIJ akan memudahkan pengunjung Kebun Binatang Surabaya (KBS), karena bisa ini untuk menggunakan fasilitas umum intermoda," katanya.

Bangunan TIJ Surabaya ini meliputi lima lantai. Diantaranya, Lantai 1 digunakan untuk Mobil Penumpang Umum (MPU), Drop off mobil pribadi serta bus pariwisata. Konsepnya, MPU tidak boleh mencari penumpang terlalu lama dan diharuskan

berangkat setelah menurunkan penumpang. "Joyoboyo konsepnya e-payment, jadi langsung berangkat yang diatur time table," ujarnya.

Kemudian, lanjut Irvan, di lantai dua hingga lima diperuntukkan untuk parkir roda dua, sepeda angin maupun roda empat dan bus pariwisata. Jumlah kendaraan yang bisa ditampung sebanyak empat bus kota, delapan bus pariwisata, 69 mikrolet, 363 mobil dan 292 motor dalam satu terminal.

Selain bisa menampung kendaraan, TIJ juga ada fasilitas lainnya yakni taman bermain dengan konsep tata tertib lalu lintas. Tempat itu ada di lantai empat, dan nantinya bisa dimanfaatkan untuk pengunjung yang membawa anggota keluarganya, melepaskan penak atau kejenuhan. "Akan ada kios yang berjualan makanan maupun souvenir. Termasuk juga ada area makan dengan konsep indoor dan outdoor," pungkash Irvan. Saat ini sendiri pembangunan sudah hampir rampung, tinggal finishing. (ard)

SD AMBRUK, KHOFIFAH: KEPALA DAERAH MONITORING BERKALA



Surabaya-Peristiwa ambruknya atap bangunan sekolah di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan warga. Sebab insiden tersebut disinyalir tak hanya terjadi sekali, namun beberapa kali.

Dari berbagai informasi yang dihimpun, setidaknya sudah ada tiga sekolah di Jatim, yakni SDN 1 Babatan Nganjuk, SDN Gentong Kota Pasuruan dan SDN Keting 2 Jember yang mengalami insiden serupa.

Bahkan, satu insiden yang terjadi di SDN Gentong Pasuruan menewaskan dua orang karena reruntuhan atap. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan insiden yang terjadi pada bangunan sekolah dasar (SD) tersebut harusnya ditangani pemerintah kabupaten/kota bukan pemprov.

"SD itu Bupati ya, jangan ke saya nanti bisa salah loh. Kalau urusannya SMK, SMA bisa ke Pemprov, tapi kalau SD, SMP ke Pemkab atau Pemkot," ujarnya saat ditemui

di Balai Pemuda Kota Surabaya pada Selasa (17/12).

Namun, Khofifah mengaku telah mengirimkan surat kepada masing-masing kepala daerah di wilayah yang mengalami insiden tersebut untuk melakukan pengecekan dan antisipasi. "Sudah kirim surat sejak (insiden) Nganjuk, Pasuruan sudah menyurat supaya masing-masing daerah, bupati atau wali kota melakukan checking kembali supaya bisa melakukan antisipasi," ucapnya.

Selain antisipasi dan pengecekan, Khofifah juga meminta secara berkala untuk memonitoring kondisi fisik bangunan apakah masih baik atau sudah waktunya untuk dilakukan perbaikan. Karena saat ini sudah memasuki musim hujan.

"Kan ini ada angin puting beliung, kemudian ada intensitas hujan yang mungkin tinggi. Jadi masing-masing (daerah) kita meminta untuk bisa monitoring kondisi fisiknya (bangunan sekolah) seperti apa," katanya.

Dalam proses monitoring tersebut, Khofifah menyebut tak hanya melibatkan kepala daerah saja tapi juga melibatkan Dinas PU kota dan provinsi. Sementara untuk perbaikan di SDN Gentong Pasuruan akan mengambil anggaran dari Kementerian PUPR.

"Pasti nanti akan ada dinas PU yang berkoordinasi dengan Dinas PU provinsi dari PU Cipta Karya pusat. Sudah tertulis itu. Kita

mengkomunikasikan dengan Kementerian PUPR sehingga Pasuruan yang membangun dari anggaran PUPR," jelasnya.

Khofifah menegaskan, tanggung jawab terhadap bangunan SD yang mengalami ambruk tersebut adalah tanggung jawab dari pemerintah kabupaten/ kota. "Tapi kan sebetulnya tanggung jawab ini ada di Pemkab Pemkot, seruan Pemprov tidak hanya ke dinas tapi surat tertulis dari Gubernur," katanya.

Trauma kejadian di SDN Keting 02 Kecamatan Jombang, sejumlah tokoh Kabupaten Jember minta DPRD tidak hanya sidak di sekolah kota, tetapi harus sisir sekolah pinggiran.

"Jangan hanya terkonsentrasi di kota saja. Kalau bisa sisir semua sekolah pinggiran, karena itu juga uang rakyat," tegas pemerhati kebijakan publik Joko Susilo.

Joko juga meminta, yang sidak bukan hanya anggota DPRD saja. Tetapi juga melibatkan orang yang memiliki kompetensi tentang kualitas bangunan.

Di tempat terpisah, aktivis anti korupsi Zainullah Amir mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Jember. "Demi kenyamanan bersama, DPRD Jember harus membuat kajian bersama dan meminta semua data penerima bantuan," ungkapnya. Sebelumnya, Ketua DPRD Komisi D Mohamad Hafidi menduga, dalam pelaksanaan proyek tersebut telah terjadi indikasi nepotisme dan permainan.



"Ada 31 dari 50 orang yang sudah tanda tangan. Teman-teman di Komisi D masih sidak, nanti kalau datang akan ada tambahan menjadi 40-an,"

**Ketua Fraksi PDIP
Edi Cahyo
Purnomo**

DPRD AJUKAN **INTERPELASI** TERHADAP BUPATI JEMBER

hana: bupati mematuhi surat mendagri, pembahasan jalan terus. Jika memakai perkada, maka pemerintah daerah hanya boleh merealisasikan anggaran wajib dan rutin sebagaimana APBD 2019.

Jember- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember mulai proses pengajuan interpelasi terhadap Bupati Jember Faida. Hal ini dipicu terkait tak adanya kuota CPNS tahun ini, serta surat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyo Purnomo ditemani Hadi Supaat terus mendatangi sejumlah anggota DPRD untuk menggalang tanda tangan dukungan interpelasi. Edi dan Hadi mendatangi satu per satu anggota Dewan di ruang komisi masing-masing. Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga menandatangani surat tersebut.

"Ada 31 dari 50 orang yang sudah tanda tangan. Teman-teman di Komisi D masih sidak, nanti kalau datang akan ada tambahan menjadi 40-an," kata Edi, Selasa (17/12). Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Jember Mohammad Satib mengatakan, hak bertanya harus digunakan DPRD Jember.

interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan

strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

"Gerindra selalu siap sejak awal," katanya. Interpelasi awalnya hanya terkait dengan tidak adanya kuota CPNS dalam rekrutmen tahun ini untuk Jember. Namun belakangan terungkap persoalan-persoalan serius. Salah satunya adalah terbitnya surat teguran dari Mendagri.

Sebagaimana diceritakan, DPRD Jember menunda pembahasan hingga pemerintah kabupaten melaksanakan perintah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Tiga perintah yang harus dilaksanakan adalah pencabutan belasan surat keputusan mutasi, pencabutan 30 peraturan bupati mengenai KSOTK (Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja), dan tidak lanjut surat Menteri Dalam Negeri mengenai peringatan atas penggantian Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Jember. "Terus terang mendengar pemeriksaan khusus, saya gemetar. Pemeriksaan itu lebih dalam daripada angket," kata Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi.

Sebenarnya permintaan DPRD Jember seder-



**Faida
Bupati
Jember**

Untuk diketahui, Bupati Faida sudah mengirimkan peraturan kepala daerah (perkada) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 ke DPRD Jember, Jawa Timur. "Kami menerimanya pada 12 Desember 2019 lalu," kata Itqon. Pimpinan berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim terkait perkada ini.

Perkada ini menggantikan Peraturan Daerah APBD 2020 yang masih belum selesai. "Itu hak bupati. Tapi pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara) APBD 2020 mandeg, karena ada sebabnya juga," kata Itqon.(ins)

DUH! MILIARAN RUPIAH ASET PEMKOT BLITAR **MANGKRAK**

Blitar - Beberapa aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dengan nilai mencapai miliaran rupiah, mangkrak dan dibiarkan rusak. Bahkan DPRD Kota Blitar, tidak pernah mendapat laporan mengenai aset yang tidak dimanfaatkan tersebut.

Beberapa aset yang mangkrak tersebut diantaranya eks Terminal Angkot di Kelurahan Ngadirjo seluas 1.600 m2, eks RSUD Mardi Waluyo di Jl. Dr. Soetomo seluas 2,3 hektar, eks SMP Negeri 10 di Kelurahan Tlumpu dan eks Sanggar Bubut Kayu di Kelurahan Tanggung yang kondisi bangunannya rusak berat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Blitar, Yohan Tri Waluyo ketika dikonfirmasi mengenai kondisi ini juga mengaku kaget, karena tidak pernah mendapat laporan dari pemkot. "Selama ini kami sebagai mitra BPKAD hanya mendapatkan laporan aset yang menghasilkan PAD yaitu Blitar Town Square," ujar Yohan.

Dijelaskan Yohan pihaknya juga baru tahu jika banyak aset milik pemkot yang tidak terurus atau mangkrak, bahkan sampai ada yang kondisinya dibiarkan rusak. "Kami akan segera

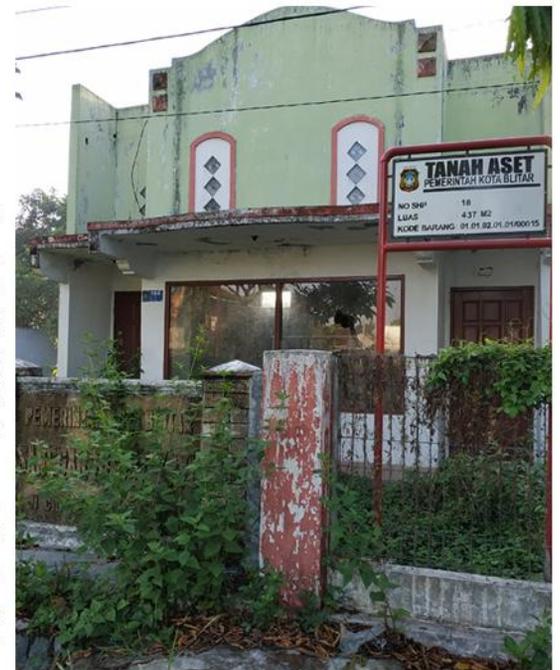
menindaklanjuti kondisi ini, dengan pihak BPKAD selaku pengelola aset daerah," jelasnya.

Keberadaan aset daerah baik bergerak seperti kendaraan dinas, maupun tidak bergerak seperti tanah dan bangunan atau gedung memang seharusnya dimanfaatkan. Lebih bagus lagi bila memberikan hasil pelayanan pada masyarakat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yohan pun berencana akan melakukan pengecekan ke lapangan, mana saja aset daerah yang belum dimanfaatkan. "Sebagai bahan pembahasan pada Januari 2020 mendatang, regulasi apa yang harus diambil untuk memanfaatkan aset mangkrak tersebut," tegasnya.

Diakui politisi Gerindra ini, jika berbicara pemanfaatan aset daerah tidak lepas dari kekuatan anggaran. Tapi juga jangan dijadikan alasan, karena dikawatirkan malah jadi pemborosan anggaran. "Jadi jangan sampai hanya bisa membangun, tapi tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal untuk pelayanan masyarakat dan peningkatan PAD," terangnya.

Disinggung mengenai kemungkinan adanya kerugian negara akibat mangkrak dan rusaknya



aset daerah tersebut, Yohan menjawab hanya akan fokus pada solusi pemanfaatan aset pungkasnya.

Sementara itu Kepala BPKAD Kota Blitar, Widodo Saptono ketika dihubungi untuk dikonfirmasi mengenai hal ini tidak memberikan jawaban. Hanya sempat bertanya konfirmasi soal apa, setelah dijawab soal aset pemkot yang belum dimanfaatkan tidak ada jawaban lagi. (ais)

Jelang Pilkada Serentak

KIPP JATIM **'WARNING'** KONFLIK KEPENTINGAN KEPALA DAERAH

Surabaya - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim mengingatkan agar Kepala Daerah tidak menyalahgunakan wewenang memberikan dukungan calon dalam Pilkada 2020 mendatang. Ketua KIPP Jatim Novli Thyssen menyatakan, penyalahgunaan wewenang tersebut terkait jabatan melekat untuk mendukung calon yang akan diusung.

Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dibatasi ruang gerak dalam kepentingan pemenangan calon yang didukung.

"Sesuai Pasal 71 ayat 3 tersebut membatasi ruang gerak Kepala Daerah dalam upaya menggunakan kewenangan jabatan yang melekat untuk kepentingan pemenangan salah

satu pasangan calon Kepala Daerah yang diusung," terang Novli, Selasa (17/12).

Pembatasan ruang gerak tersebut dikatakan Novli berlaku di daerah sendiri maupun daerah lain. Tenggat waktu yang diberlakukan selama enam bulan. "Sebelum tanggal penetapan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih," ujar dia.

Novli menyatakan, kewenangan yang melekat pada jabatan sebagai Kepala Daerah, haruslah bersikap netral. Serta tidak diperkenankan memfasilitasi dalam bentuk program atau kegiatan yang bersumber dari APBD yang bertujuan menguntungkan pasangan calon yang didukungnya.

"Termasuk melakukan sosialisasi memperkenalkan pasangan calon yang diusulkannya atau didukungnya dalam seriap kunjungan kerja formil maupun non formil," terang Novli.

Novli
Thyssen,
Ketua
KIPP Jatim



Ia menambahkan, jika terhadap kepala daerah yang terbukti menggunakan kewenangannya baik itu dalam bentuk program atau kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon maka dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU. "Untuk itu kami tetap mengawasi agar transparansi berjalan dengan baik," pungkas Novli. (ist)



Pasca 9 Tahun, Instagram Akhirnya Batasi Usia 13+

"Meminta informasi ini akan membantu mencegah orang di bawah umur bergabung dengan Instagram, membantu kami menjaga kaum muda lebih aman dan memungkinkan pengalaman yang lebih sesuai dengan usia secara keseluruhan,"



Instagram menghadirkan fitur pemeriksaan usia 13+. Terkait perlindungan pengguna di bawah umur IG jauh tertinggal dibanding aplikasi serupa lainnya.

Sekarang Instagram akan meminta pengguna baru untuk memasukkan tanggal lahir mereka dan melarang pengguna yang berusia kurang dari 13 tahun untuk bergabung.

Mengutip Tech Crunch, Rabu, 4 Desember 2019, fitur tersebut muncul setelah sembilan tahun Instagram hadir. Dan akhirnya memikul lebih banyak tanggung jawab untuk melindungi anak-anak di bawah umur dari masalah dengan media sosial.

Namun, aplikasi besutan Facebook itu tidak akan menanyakan usia pengguna yang sudah terdaftar, jadi Instagram akan menutup mata terhadap anak-anak di bawah umur yang sudah ada di antara 1 miliar anggotanya.

Instagram akan mulai menggunakan info usia untuk menawarkan pendidikan tentang

usia untuk menawarkan pendidikan tentang pengaturan dan kontrol privasi baru untuk pengguna yang lebih muda. Itu juga menambahkan opsi untuk hanya membolchkan orang yang pengguna ikuti untuk mengirim pesan, menambahkan ke grup atau membalas Cerita.

"Meminta informasi ini akan membantu mencegah orang di bawah umur bergabung dengan Instagram, membantu kami menjaga kaum muda lebih aman dan memungkinkan pengalaman yang lebih sesuai dengan usia secara keseluruhan," demikian dalam catatan Instagram.

Sementara Facebook, Snapchat dan TikTok telah meminta pengguna untuk memasukkan tanggal lahir mereka segera setelah memulai proses pendaftaran. TikTok membangun seluruh bagian terpisah dari aplikasinya di mana anak-

anak dapat menonton video, tapi tidak memposting atau berkomentar, setelah didenda US\$ 5,7 juta (setara Rp 80,4 miliar) oleh FTC karena melanggar COPPA.(ins)



JIANG JIANQI

Punya Harta Rp 16 T dari Jualan Teh Susu



Milk tea menjadi salah satu jenis minuman yang digandrungi oleh masyarakat di Indonesia, bahkan dunia. Tak heran bila bisnis yang menjual hasil racikan teh dan susu ini mampu mendatangkan keuntungan besar.

Seperti yang dialami oleh Jiang Jianqi, salah satu pendiri dan pemimpin Xiangpiaopiao Food, pemasok teh susu instan terbesar di China. Berdasarkan catatan Forbes, perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Shanghai pada 30 November 2017.

Xiangpiaopiao memiliki 1.095 distributor di China pada akhir September 2017 yang mencakup semua provinsi di sana. Namun kesuksesan tersebut tidak dia peroleh secara instan. Berasal dari Provinsi Zhejiang, Jiang sebelumnya bekerja untuk Administrasi Kereta Api Shanghai setelah lulus dari sekolah teknik menengah.

Tak lama dia bekerja di sana lalu memutuskan untuk mencoba bekerja di pabrik pembuatan mangkuk nasi dari besi hingga pabrik makanan. Singkat cerita, dia mulai menekuni bisnisnya sendiri, dia sempat menjajal bisnis es krim. Namun lambat laun disadari bahwa

buatan mangkuk nasi dari besi hingga pabrik makanan. Singkat cerita, dia mulai menekuni bisnisnya sendiri, dia sempat menjajal bisnis es krim. Namun lambat laun disadari bahwa es adalah produk musiman. Penjualannya pada musim dingin akan turun tajam.

Suatu hari, dia tidak sengaja melihat deretan kedai teh susu. Dia melihat orang-orang berbaris cukup panjang di sana. Tidak mau dibawa rasa penasaran, dia memutuskan ikut antri membeli secangkir teh susu.

Dalam antrian panjang, dirinya menyadari bahwa ada ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Dia menangkap peluang bisnis tersebut hingga akhirnya pada Agustus 2005, Jiang mendirikan Hong fluttering tea.

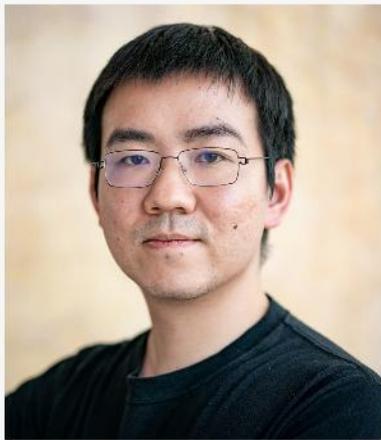
Dengan sabar dia mencoba berbagai cara untuk sukses di bisnis teh susu. Tak sia-sia, setelah berjalan 11 tahun, lebih dari 1 miliar gelas teh susu terjual dalam setahun.



Ini juga menjual teh jus dan teh rasa lainnya yang dikemas dalam cangkir. Perusahaan, yang mengklaim memiliki lebih dari 60% saham dari pasar domestik untuk teh susu kemasan, sekarang mengeksplorasi ekspansi ke Amerika Utara dan Eropa. Jiang memiliki lebih dari 70% saham perusahaan yang terdaftar di Shanghai bersama istri dan putrinya.

Forbes mencatat kekayaan pria tersebut kini mencapai US\$ 1,2 miliar atau setara Rp 16,8 triliun mengacu kurs Rp 14.000 per dolar AS. (ist)

3 Orang Kaya Baru di China 2019



Jihan Wu

Kekayaan bersih:

USD 1,8 miliar atau Rp 25 triliun

Umur:

33 tahun

Sumber kekayaan:

cryptocurrency atau mata uang kripto
- Salah satu pendiri Bitmain, salah satu perusahaan chip penambangan cryptocurrency terbesar di China, menjadi pemimpin tunggal setelah salah seorang pendiri perusahaan itu, Micree Zhan, bersama menjalankan Bitmain selama bertahun-tahun, yang diduga diusir dari perusahaan tersebut pada bulan Oktober. Bitmain dilaporkan mengajukan IPO AS pada bulan yang sama, lebih dari setahun setelah upaya gagal untuk go public di bursa saham Hong Kong. Wu, yang ikut mendirikan layanan keuangan crypto bernama Matrixport pada bulan Februari, memiliki sekitar 20% saham di Bitmain.



Zhang Liaoyuan

Kekayaan bersih:

USD 1,6 miliar atau Rp 22 triliun

Umur:

43 tahun

Sumber kekayaan:

Makanan
- Seorang mantan tukang listrik untuk perusahaan pengemasan plastik, Zhang mendirikan makanan ringan penjualan online Three Squirrels pada 2012. Perusahaan, yang menjual kacang kemasan, biji-bijian dan buah-buahan kering, dengan cepat mendapatkan popularitas dengan pemasaran yang penuh warna. Membuka lokasi toko pertamanya pada tahun 2016 yang disebut "Toko Makanan". Sekarang dia memiliki lebih dari 70 toko di seluruh Tiongkok. Perusahaan dengan penjualan yang sudah go public sebesar USD1 miliar atau setara dengan Rp14 triliun di Shenzhen pada Juli 2019.



Jiang Jianqi

Kekayaan bersih:

USD 1,2 miliar atau Rp 16 triliun

Umur:

54 tahun

Sumber kekayaan:

Makanan
- Jiang mendirikan Xiangpiaopiao Food pada 2005, dikenal karena minuman teh-susu instan yang dapat diseduh dalam gelas sekali pakai. Ini juga menjual teh jus dan teh rasa lainnya yang dikemas dalam cangkir. Perusahaan, yang mengklaim memiliki lebih dari 60% saham dari pasar domestik untuk teh susu kemasan, sekarang mengeksplorasi ekspansi ke Amerika Utara dan Eropa. Jiang memiliki lebih dari 70% saham perusahaan yang terdaftar di Shanghai bersama istri dan putrinya.(ist)



Miliki Hewan Peliharaan, Kembangkan Karakter Anak

Apakah Anda memelihara kucing, anjing, atau hewan peliharaan lainnya di rumah? Lalu, apakah anak Anda ikut memeliharanya juga? Jika iya, ini bisa menjadi hal yang baik untuk anak.

Memiliki hewan peliharaan dapat menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi mereka. Dengan memelihara hewan, berbagai karakter baik anak akan tumbuh dan berkembang. Memelihara hewan adalah komitmen dan tanggung jawab yang besar.

Oleh sebab itu, jangan memberi hewan peliharaan untuk anak ketika usia mereka masih sangat kecil. Anak belum cukup dewasa untuk membantu memelihara hewan peliharaan hingga ia berusia 7 atau 8 tahun.

Namun, memelihara hewan dapat memberi manfaat untuk anak, seperti: Mengajarkan nilai-nilai pada anak. Memiliki hewan peliharaan dapat menumbuhkan atau mengembangkan rasa

tanggung jawab dalam diri anak. Meski masih dibantu, namun ini membuatnya berani mengambil tugas.

Mereka bahkan juga bisa menyerap contoh pengasuhan kita untuk diterapkan pada hewan peliharaannya, seperti bersikap baik dan lembut. Hal ini juga menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang dalam diri anak.

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak yang memiliki hewan peliharaan dalam keluarganya cenderung mempunyai harga diri yang lebih tinggi. Hal ini bukan tanpa alasan, sebab memiliki hewan peliharaan dapat membuat anak merasa dicintai dan mencintai, serta merasa memiliki teman untuk diajak berbicara atau bermain.

Hewan peliharaan bahkan juga dapat meningkatkan keterampilan akademik anak. Sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang membaca dengan suara keras kepada hewan peliharaan dapat membuat mereka lebih percaya diri untuk membaca.

Menyikat, menepuk, atau mengusap hewan

peliharaan berbulu dapat menurunkan tingkat stres, tak hanya bagi orang dewasa namun juga anak-anak. Selain itu, para ahli juga berpendapat bahwa anak-anak yang tumbuh dengan hewan peliharaan lebih kecil kemungkinannya untuk menderita alergi karena paparan dini terhadap bakteri tertentu.

Tidak semua hewan dapat dipelihara. Oleh sebab itu, jika Anda memiliki keinginan untuk



memberi anak hewan peliharaan, maka pilihlah hewan yang cocok untuk mereka. Beberapa hewan cukup aman untuk dipelihara oleh anak-anak, namun pastikan mereka tetap mendapat pengawasan dan bantuan dari orangtua. (Ins)



**Nur Alimah,
Mahasiswa
Unusa Peraih
Emas SEA
Games**



Prestasi membanggakan berhasil ditorehkan Nur Alimah Priambodo, mahasiswa semester 5 Prodi S1 Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa). Nur Alimah menyabet medali emas ski air SEA Games ke-30 di Filipina. Dia menyabet emas untuk nomor cable ski mixed team.

Tim ski air sendiri terdiri dari Nur Alimah Priambodo, Safira Widodo, Emilia Hampp, Muhammad Putu, Adc Hermana, dan Dimas Suprihono. Perolehan emas Nur Alimah dan kawan-kawan menambah koleksi sementara medali emas Indonesia. Pertandingan cabang ski air SEA Games 2019 Filipina diikuti lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, serta tuan rumah Filipina.

“Alhamdulillah, mudah-mudahan saya tetap bisa berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di bidang olahraga,” kata Nur Alimah, dalam keterangan tertulisnya.

Nur Alimah lantas mengungkapkan jika prestasi yang berhasil ditorehkan tersebut tak terlepas dari kerja kerasnya. Selama dua bulan terakhir Nur Alimah harus latihan ketat di Jakarta dan Filipina. Dia pun juga harus meminta izin untuk tidak mengikuti kuliah.

“Schingga solusi yang saya lakukan, mengatur kegiatan belajar mandiri dan mereview secara mandiri di sela-sela latihan. Tentu juga atas bantuan teman-teman FK Unusa yang mem-follow up materi-materi kuliah dan info-info terbaru, kuliah masih tetap jalan,” jelasnya.



Nur Alimah sendiri menekuni olahraga ski air sejak SD, mengikuti jejak keluarga yang berkecimpung di olahraga yang sama. “Dan Alhamdulillah, justru dari olahraga ini saya mendapat banyak pengalaman sampai sekarang,” imbuhnya.

Meski mendapat dukungan penuh dari keluarga maupun kampus, Nur Alimah mengaku sempat stres menjelang SEA Games. Dia merasa lelah fisik dan mental karena harus bisa membagi waktu dan perhatian antara kuliah dengan kegiatan olahraga.

“Jujur saja tidak mudah. Bayangkan saja, jadwal perkuliahan yang super padat dan banyak ujian, serta ketatnya jadwal latihan. Saya sempat menangis. Tapi lagi-lagi dukungan orang-orang terdekat mampu menguatkan saya untuk tetap berjuang, terutama dukungan kakak kandung saya dan orang tua,” paparnya.

Perolehan medali emas SEA Games 2019 Filipina merupakan pencapaian tertinggi Nur Alimah sejauh ini. Dia sudah mengoleksi medali perak di ajang SEA Games Singapura (2015) dan SEA Games Malaysia (2017).

“Jujur saja tidak mudah. Bayangkan saja, jadwal perkuliahan yang super padat dan banyak ujian, serta ketatnya jadwal latihan. Saya sempat menangis. Tapi lagi-lagi dukungan orang-orang terdekat mampu menguatkan saya untuk tetap berjuang, terutama dukungan kakak kandung saya dan orang tua,”

- Nur Alimah -



Sneakers Ramah Lingkungan dari Alga hingga Daun Nanas

Kini semakin banyak brand fashion yang menciptakan produk ramah lingkungan terbuat dari bahan-bahan alami. Terbaru, ada Reebok lewat sneakers Forever Floatride GROW.

Brand sportswear asal Inggris ini merilis sneakers dengan material yang tidak konvensional dalam pembuatan alas kaki olahraga. Reebok menggunakan bahan-bahan dari alam seperti biji minyak castor, pohon eucalyptus (bahan alami untuk produksi minyak kayu putih), alga dan karet alami.

Bagian atas sneakers merupakan bahan rajutan terbuat dari serat eucalyptus yang diklaim memiliki fitur untuk memudahkan kaki 'bernapas' saat dikenakan. Sementara untuk sol bagian dalam menggunakan alga yang dipanen dari area ramah lingkungan, menghasilkan material tahan lama juga antibau.

Reebok juga bekerjasama dengan perusahaan Jepang Sekisui Corporation untuk menciptakan midsole super ringan yang dibuat dari biji minyak castor. Fitur terakhir yang terbuat dari bahan ramah lingkungan adalah karet alami untuk sol bagian luar. Seperti dikutip dari Hypebeast, sol dari karet alami lebih tahan lama dan fleksibel.

Sneakers Reebok Forever Floatride GROW

juga bersifat biodegradable. Artinya dapat hancur atau terurai oleh organisme hidup lainnya setelah rusak dan tidak bisa lagi digunakan.

Untuk berpartisipasi dalam penyelamatan lingkungan, Reebok berencana mengurangi penggunaan virgin polyester dan sama sekali menghilangkannya dari campuran material lainnya pada 2025. Beralih ke pemakaian material alami juga memanfaatkan bahan daur ulang. Reebok Forever Floatride GROW sendiri baru akan dirilis pada musim gugur 2020.

Terbuat Daun Nanas

Sebelumnya, Mercer Amsterdam, brand sepatu asal Belanda juga meluncurkan sneakers ramah lingkungan yang terbuat dari tanaman nanas. Bukan buahnya yang rasanya manis-asam-segar, tapi kulit nanas yang digunakan sebagai bahan utama sepatu.

Untuk membuat sneakers ramah lingkungan ini, Mercer Amsterdam bekerjasama dengan Pinatex, tim peneliti yang menciptakan inovasi membuat kulit sintesis dari daun nanas. Material ini diklaim lebih ramah lingkungan, alami, berkelanjutan dan berkomitmen menjaga keberlangsungan bumi.

"Pinatex terbuat dari serat daun nanas. Daun

ini dipisahkan saat panen buah nanas, jadi bahan mentahnya tidak memerlukan sumber daya alam lain untuk diproduksi," seperti dijelaskan dalam situs resmi Mercer Amsterdam. Daun nanas dibeli langsung dari petani di Filipina untuk mendukung perekonomian warga lokal di sana, sekaligus memperkuat ekspor mereka.

Selain menggunakan bahan alami, produksi sneakers juga diklaim ramah lingkungan. Tahapan produksinya menggunakan lebih sedikit air dan minim limbah.

Sneakers bernama W3rd - Vegan - Pineapple ini dijual seharga 250 Euro atau sekitar Rp 4 juta. Produk tersedia mulai 31 Maret 2019. Sneakers mania, tertarik beli sepatu ramah lingkungan ini? (ins)



KPK

Di tengah hangatnya tebak-tebakan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang rencananya akan dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama pimpinan komisi anti-rasuah periode 2019-2023 pada Jumat (20/12), politikus di DPR RI dibuat 'kepanasan'. Pasalnya, KPK mengidentifikasi dugaan aliran dana setidaknya Rp 10,2 miliar kepada politisi dan penyelenggara negara terkait kasus proyek pengadaan di Kemenag.

Wakil Ketua (Waka) Komisi VIII DPR, Acc Hasan Syadzily mengatakan publik tak perlu berspekulasi terlalu jauh soal dugaan keterlibatan politikus. Acc meminta publik harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Soal dugaan uang itu mengalir ke para politisi, tentu kita tak perlu berspekulasi lebih jauh. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Silakan buka fakta hukumnya tentang siapa-siapa politisi yang dimaksud," kata Ace, Selasa (17/12). Untuk diketahui, Komisi VIII memang memiliki lingkup tugas di bidang Agama dan Sosial.

Untuk diketahui, tersangka baru yang dijerat KPK sebagai tersangka adalah seorang mantan pejabat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Ditjen Pendis Kemenag) atas nama Undang Sumantri. Dia diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang total kerugian negara mencapai Rp 16 miliar.

KPK menduga Undang terlibat dalam 2 kasus. Pertama, korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk MTs serta pengadaan pengembangan Sistem Komunikasi senilai Rp 5,04 miliar. Kedua Media Pembelajaran Terintegrasi untuk Jenjang MTs dan MA pada Ditjen Pendis Kemenag pada 2011 senilai Rp 5,2 miliar.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. "Kalau ada yang menyalahi, dianggap keterlibatan dikejar saja. Ya pokoknya kalau ada bukti hukum ya dikejar saja, nggak usah jadi fitnah," katanya.

Marwan menyayangkan KPK justru mengumbar hal yang belum tentu terbukti. Menurutnya, KPK justru membebankan politisi. "Jangan disebut-sebut ada keterlibatan politisi. Itu kan namanya mengembangkan masalah, menjadikan beban terhadap politisi. Itu kejam juga yang begitu-begituan," jelas Marwan.

Menurut data KPK dalam 4 tahun ini, dalam daftar tersangka, anggota dewan baik di DPR maupun di DPRD masih kalah jumlah dari unsur swasta yang ada di urutan teratas. Dari tahun 2016 sampai 2019, tercatat setidaknya ada 156 anggota legislatif yang

dijerat KPK sebagai tersangka, sedangkan swasta di angka 159 orang.

Informasi itu tercantum dalam slide atau salindia presentasi yang disampaikan Pimpinan KPK periode 2015-2019 dalam catatan akhir tahun. Saat salindia itu ditampilkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang membacakan pemaparan.

"Dari seluruh fungsi yang kami jalankan, fungsi penindakan adalah fungsi yang paling menyita perhatian. Selama empat tahun, KPK melakukan 498 penyelidikan, 539 penyidikan, 433 penuntutan, 286 inkrah, dan 383 eksekusi. Selama empat tahun terakhir, ada 608 tersangka yang kami tangani dalam berbagai modus perkara," kata Saut dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/12). Selain itu Saut turut memaparkan mengenai operasi tangkap tangan (OTT). Selama 4 tahun ini, ada 87 OTT dengan total tersangka awal 327 orang.

"Dari fungsi monitoring dan pencegahan korupsi, KPK menyelamatkan potensi kerugian negara dan atau pendapatan negara sejumlah total Rp63,8 triliun," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo.

KPK, kata dia, menyoroti sektor-sektor yang terkait langsung terhadap masyarakat seperti Sektor Kesehatan, Sumber Daya Alam, dan Pangan, yaitu kajian tentang impor bawang putih. Lalu, menurutnya, terdapat dua kajian besar yang dilakukan dalam sektor kesehatan, yakni Kajian Pengadaan Alat Kesehatan dan Kajian Jaminan Kesehatan Nasional. "Dari kajian di sektor kesehatan ini, potensi kerugian keuangan negara yang dapat diselamatkan adalah Rp18,15 triliun," ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan, selama tahun 2016 sampai 2019, KPK berhasil mendorong optimalisasi pendapatan daerah sebesar Rp 29 triliun.

"Total optimalisasi pendapatan daerah dari hasil koordinasi dan supervisi pencegahan selama 4 tahun adalah Rp 29 triliun," katanya. Alex menuturkan, KPK melakukan fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di 34 provinsi dan 542 kabupaten/kota.

KPK juga mengawal penyelesaian sengketa aset daerah dari konflik kepemilikan aset milik pemda dengan pihak swasta. Upaya itu berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 4,8 triliun. "KPK juga mendorong Pemda untuk menagih pengembang menyerahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti jalan, taman, irigasi, pasar, RSUD, kepada pemda setempat. Sebanyak 826 dari 2051 aset yang sudah diselesaikan

bernilai Rp 4,4 triliun," ujar dia.

NAMA KEPALA DAERAH 'KASINO' SUDAH DIKANTONGI

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku sudah tahu nama salah satu dari sejumlah kepala daerah yang memiliki rekening kasino di luar negeri. Bahkan Agus berharap temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu bisa ditangani KPK. "Yang saya tahu orangnya satu itu. Kalau yang lain saya belum tahu," katanya.

Memang, berdasarkan PPATK, nama kepala daerah yang memiliki rekening kasino itu bukan hanya satu. Namun siapa salah satu kepala daerah itu yang dimaksud Agus tidak diberikannya. "Ya kita mengetahui itu. Rasanya pemerintah juga sudah kita beritahu ya. Ya semoga nanti ada langkah sinergis lah," ucapnya.

Bahkan, kata Agus, anak buah dari kepala daerah itu sudah berstatus tersangka di KPK. Namun Agus enggan membocorkan siapa anak buah kepala daerah itu, termasuk soal kasusnya. "Ada kasus yang ditangani. Jadi rasanya, anak buahnya sudah ada yang jadi tersangka," ucap Agus.

Bahkan, para kepala daerah pemilik rekening kasino itu disebut Agus sudah diketahui pemerintah. Dia berharap pemerintah ada langkah pasti menindaklanjuti temuan PPATK itu. "Rasanya pemerintah juga sudah kita beritahu ya. Ya semoga nanti ada langkah sinergislah," kata Agus.

Sayangnya Agus tidak merinci siapa anak buah kepala daerah yang sudah ditangani KPK itu. Selain itu Agus juga tidak membeberkan siapa kepala daerah yang dimaksudnya itu.

Sebelumnya Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin yang mengungkapkan jajarannya telah menemukan adanya dugaan kepala daerah melakukan transaksi keuangan di luar negeri yaitu pada rekening kasino. Badaruddin menyebut para kepala daerah itu melakukan transaksi uang dalam bentuk mata uang asing dengan nominal Rp 50 miliar.

Badaruddin mengaku telah melakukan diskusi dengan aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi (tipikor) seperti KPK, Polri, dan kejaksaan, terkait kasus ini. Dia menyebut diskusi yang dilakukan sudah dalam tahap memberikan informasi awal perihal rekening kasino itu. "Soal ada tidaknya tindak pidana dalam transaksi yang kami rekam tersebut itu strategi kami-lah dengan penegak hukum. Misalnya kapan dan di mana uang itu disimpan itu nanti akan kita bahas dengan penegak hukum," beber Badaruddin. (ins)

UU 'SAPU JAGAT' : PT TAK HARUS BERMODAL RP 50 JUTA



Jakarta - Pemerintah tengah menyelesaikan dua undang-undang 'sapu jagat' untuk merevisi semua UU yang dianggap menghambat. Keduanya yakni UU omnibus law cipta lapangan kerja dan omnibus law perpajakan.

Dalam omnibus law cipta lapangan kerja, salah satu klaster akan didorong adalah kemudahan berusaha. Di dalamnya pemerintah menjanjikan kemudahan dalam pendirian badan hukum untuk usaha seperti PT.

"Dari sisi modal terutama. Untuk usaha kecil sangat diuntungkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Perayaan HUT AEI di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (17/12).

Airlangga menjelaskan, dalam klaster ini akan dihapus persyaratan modal Rp 50 juta untuk pendirian PT. Itu artinya dengan modal berapapun akan bisa mendirikan PT. Pada aturan lama, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") mengatur "Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Dalam klaster ini pemerintah juga menjanjikan kemudahan dalam proses. Misalnya terkait keimigrasian, investasi bisa menjadi jaminan bagi WNA mendapatkan Izin Tinggal Sementara (ITAS) ataupun Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Selain itu investor juga akan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan visa untuk kegiatan maintenance, vokasi, start up, ataupun kunjungan bisnis. Pemerintah juga akan

memberikan fleksibilitas dalam hal kewajiban membuat produk atau menggunakan proses paten di Indonesia. Jaminan bahan baku impor juga akan ditetapkan oleh sektor industri.

Airlangga Hartarto menegaskan rancangan perundang-undangan Omnibus Law merupakan salah satu cara untuk menghilangkan ego sektoral antar kementerian. Omnibus Law akan menjadi terobosan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui harmonisasi peraturan.

"Penerapan ini bisa melakukan restrukturisasi perekonomian dan kita sudah mencoba beberapa konsep tersebut. Ini akan menghilangkan inefisiensi proses dan menghilangkan ego sektoral," katanya.

Airlangga menjelaskan keberadaan Omnibus Law akan membuat penyederhanaan perizinan mulai dari izin lokasi, IMB, lingkungan untuk syarat investasi.

Melalui Omnibus Law ini ada 11 cluster dan 82 Undang-Undang yang disinergikan jadi satu. Kalau menggunakan mekanisme normal, untuk mengamandemen UU dalam satu tahun biasanya cuma bisa 5 UU. Airlangga mengatakan proses pembahasan RUU Omnibus Law dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dimulai Januari.

Puan Dibisik Jokowi

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani dibisiki oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar paket omnibus law itu dirampungkan dalam tiga bulan saja. "Iya belum bisa dipastikan, karena saya terima

surpresnya aja belum," kata Puan.

Masa persidangan DPR akan berakhir hari ini sebelum memasuki masa reses. Namun hingga kemarin DPR belum menerima satu pun surpres dari pemerintah.

Menurut Puan, pemerintah berharap bisa menyerahkan surpres di bulan Desember ini. "Namun saya sudah menyampaikan besok (hari ini) sudah penutupan masa sidang reses DPR," kata Puan.

Artinya, lanjut dia, pemerintah baru dapat menyerahkan surpres pada Januari 2020. Padahal, RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020 sudah akan disahkan dalam dapat paripurna hari ini.

Dalam sejumlah kesempatan, Puan juga mengatakan DPR tak akan berfokus pada kuantitas dalam membuat atau merevisi undang-undang, melainkan pada kualitas. Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan RUU Omnibus Law Perpajakan yang pertama akan diajukan ke DPR.

Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah menemui Puan untuk menjelaskan ihwal RUU Omnibus Law Perpajakan itu. Sri Mulyani mengatakana ada 28 pasal dalam tujuh Undang-undang yang akan diamandemen terkait Omnibus Law Perpajakan ini. Namun Puan mengatakan DPR ingin menunggu surpres dari pemerintah terlebih dulu.

"Mengamandemen UU walaupun pasalnya hanya sedikit tentu saja perlu kerja dan mekanisme harus kami lakukan," kata Ketua Bidang Politik dan Keamanan PDIP ini. (ins)

Peringkat Daya Saing Indonesia dan Sejumlah Negara ASEAN (2019)

Sumber World Economic Forum



Skor Kemudahan Berusaha Indonesia dan Sejumlah Negara ASEAN

Sumber Bank Dunia (2018)



sumber : antaranews.com